

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik paling berkepanjangan dan kompleks dalam sejarah politik modern. Akar permasalahan ini tidak hanya terletak pada perebutan wilayah, tetapi juga pada dimensi historis, ideologis, dan identitas budaya yang telah mengakar selama berabad-abad. Israel, sebagai negara Yahudi modern, dan Palestina, sebagai tanah air bagi bangsa Arab Palestina, terus berupaya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah yang sama di kawasan Timur Tengah. Menurut Affilah et al. (2023), tanah Palestina memiliki nilai religius yang sangat tinggi karena dianggap suci oleh tiga agama besar dunia, yakni Islam, Kristen, dan Yudaisme. Kedua belah pihak memandang wilayah tersebut bukan hanya sebagai aset politik, tetapi juga sebagai simbol identitas dan spiritualitas yang melekat pada sejarah masing-masing.

Deklarasi Balfour pada tahun 1917 menjadi titik awal intensifikasi konflik antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina. Namun, ketegangan sebenarnya telah tumbuh sejak meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina pada awal abad ke-20, yang diperkuat oleh munculnya gerakan Zionisme. Setelah Perang Dunia I, mandat Inggris atas Palestina dari Liga Bangsa-Bangsa memperkuat legitimasi aspirasi Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di wilayah tersebut. Firdaus et al. (2020) menjelaskan

bahwa migrasi besar-besaran Yahudi ke tanah Palestina dan pembentukan gerakan Zionis Israel mengubah struktur sosial dan politik kawasan, yang memunculkan perlawanan dari penduduk Arab Palestina yang khawatir kehilangan hak atas tanah dan kedaulatan mereka.

Pada tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara Yahudi dan Arab yang memicu perang terbuka dan berujung pada berdirinya Negara Israel pada 1948. Sejak itu, konflik Israel–Palestina terus berkembang menjadi rangkaian perang, pendudukan, dan kebijakan militer yang kompleks. Deklarasi Balfour dan peristiwa-peristiwa pasca-1948 menjadi fondasi konflik geopolitik yang masih berlangsung hingga kini. Hingga saat ini, serangan dan invasi darat Israel di Jalur Gaza terus terjadi, menyebabkan korban sipil dalam jumlah besar. Human Rights Watch (2023) mencatat bahwa lebih dari sebelas ribu warga Palestina terbunuh, termasuk ribuan anak-anak, yang menimbulkan reaksi moral dan kecaman dari masyarakat internasional terhadap kebijakan militer Israel.

Secara geopolitik, Israel memiliki posisi strategis di Timur Tengah dan telah menjadi sekutu utama bagi negara-negara Barat. Menurut , RAND Corporation (2022) hubungan antara Israel dan Barat tidak hanya didorong oleh kepentingan ideologis, tetapi juga oleh pertukaran ekonomi, teknologi, dan kerja sama militer. Inggris dan Amerika Serikat melihat Israel sebagai mitra strategis yang mampu menjaga kepentingan Barat di kawasan yang penuh gejolak. Dengan demikian, dukungan terhadap Israel seringkali dipertahankan atas dasar kalkulasi kekuasaan dan stabilitas regional, bukan semata-mata pertimbangan kemanusiaan.

Kondisi geopolitik yang tidak stabil di wilayah ini juga dipengaruhi oleh kebijakan ekspansi pemukiman Yahudi yang terus dilakukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur wilayah yang oleh komunitas internasional dianggap ilegal. Brookings Institution (Najjar, 2024) menyoroti bahwa pembagian geografis antara Gaza dan Tepi Barat, yang dipisahkan oleh wilayah Israel, memperlemah kesatuan politik Palestina dan menghambat pembentukan negara yang berdaulat. Situasi diperparah oleh blokade terhadap Gaza sejak 2007 yang menyebabkan krisis kemanusiaan akut. Sementara itu, keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat, Rusia, Turki, Iran, dan negara-negara Arab lainnya menambah kompleksitas konflik yang kini telah melampaui isu teritorial menjadi persoalan keamanan dan ideologi.

Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, memainkan peran penting dalam menentukan arah konflik. Dukungan politik, finansial, dan militer yang besar menjadikan Israel memiliki kekuatan asimetris terhadap Palestina. Namun, dinamika domestik Amerika Serikat belakangan menunjukkan adanya pergeseran opini publik. Seperti dijelaskan oleh laporan kebijakan Gedung Putih pada akhir 2023, Presiden Joe Biden sempat mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk meninjau ulang operasi militer di Gaza karena tekanan internasional dan meningkatnya kritik publik di dalam negeri.

Konflik Israel Palestina bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi juga manifestasi dari benturan antara ideologi, persepsi ancaman, dan konstruksi identitas nasional. Pertikaian ini menggambarkan bagaimana suatu negara membentuk pola pikir strategisnya dalam memaknai keamanan, eksistensi, dan kedaulatan. Menurut

Aswir et al. (2021), kegagalan implementasi perjanjian damai Oslo tahun 1993 menunjukkan bahwa akar konflik tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan diplomatik formal, karena faktor ideologis dan persepsi strategis memainkan peran yang lebih mendalam.

Fenomena konsistennya agresi dan intensi pendudukan Israel terhadap Palestina mengindikasikan adanya pola budaya strategis yang membentuk cara pandang dan pengambilan keputusan politik Israel. Dengan memahami dimensi budaya strategis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap intensi pendudukan Israel di wilayah Palestina pada periode 2021–2024, sekaligus memberikan pemahaman baru tentang bagaimana struktur identitas, sejarah, dan persepsi keamanan membentuk perilaku kebijakan luar negeri suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

“Mengapa Israel tetap persisten dalam melakukan agresi militer terhadap Palestina pada tahun 2022–2024, meskipun mendapat kecaman dari komunitas internasional?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik serta perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Israel–Palestina, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan konflik tersebut dan kontribusi potensialnya terhadap upaya perdamaian dan stabilitas kawasan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami peran nilai-nilai budaya, norma, serta keyakinan yang membentuk *strategic culture* Israel dan Palestina, serta bagaimana unsur-unsur tersebut memengaruhi pola perilaku dan dinamika konflik antara kedua pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik Israel–Palestina, khususnya dalam konteks kebijakan pendudukan yang dijalankan oleh Israel di wilayah Palestina. Melalui pendekatan yang berorientasi pada analisis kebijakan dan budaya strategis, hasil

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, lembaga riset, maupun pihak yang berkepentingan dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik secara lebih objektif dan berbasis data. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif kajian yang memberikan sudut pandang akademik yang objektif, tidak terjebak pada narasi emosional atau bias politik, tetapi berupaya menempatkan konflik secara proporsional berdasarkan pendekatan ilmiah dan temuan empiris.

1.4.2 Manfaat Akademis

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap literatur akademis tentang konflik bersenjata dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik prodi hubungan internasional Universitas Diponegoro. Temuan penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran *strategic culture* dalam membentuk perilaku negara, serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang meneliti isu-isu Timur Tengah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, terutama dalam memperluas perspektif tentang dinamika konflik dan proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konflik Israel–Palestina dari berbagai sudut pandang, terutama dalam konteks sejarah, politik, agama, dan hukum

internasional. Misri (2019) dalam karyanya *Israel dan Palestina: Sejarah, Konflik, dan Masa Depan* menjelaskan bahwa dominasi Zionis Israel atas wilayah Palestina tidak dapat dilepaskan dari dukungan sekutu-sekutu utamanya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Di sisi lain, posisi Palestina semakin melemah secara struktural pasca kekalahan negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, dan Yordania dalam Perang Enam Hari tahun 1967 yang berujung pada hilangnya sebagian besar wilayah Arab. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan munculnya Rancangan Undang-Undang Negara Yahudi yang diajukan oleh Benjamin Netanyahu, yang secara politik dan ideologis memperkuat posisi eksklusif Israel di atas tanah Palestina.

Fokus pada upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi juga banyak dikaji. Dina Tsalist Wildana (2009) menyoroti dinamika perundingan damai Israel–Palestina serta keterlibatan pihak ketiga dalam konflik ini. Temuannya menunjukkan bahwa berbagai proses perdamaian yang telah diupayakan belum mampu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya kepentingan politik dan keamanan di masing-masing pihak, yang kerap menghambat implementasi kesepakatan damai secara konsisten.

Dari sisi akar konflik, Mamin Abd. Gani (2013) menguraikan bahwa konflik Israel–Palestina tidak hanya berakar pada pertentangan politik, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi agama dan ideologi. Ketegangan yang semula bersifat religius kemudian berkembang menjadi perebutan ideologi dan kekuasaan politik. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan Israel dalam membangun permukiman di wilayah Otoritas Palestina telah mempersempit ruang hidup masyarakat Palestina dan menjadi salah satu faktor

utama yang memperpanjang konflik. Dalam konteks penyelesaian, Mamin merekomendasikan solusi dua negara (*two-state solution*) dengan keterlibatan mediator internasional seperti Amerika Serikat dan Mesir.

Ketimpangan kekuatan dalam konflik Israel–Palestina turut menjadi fokus pembahasan Moh. Hamli (2013), yang menekankan bahwa Israel tidak hanya melakukan agresi militer dengan dalih mempertahankan diri, tetapi juga memberlakukan blokade terhadap wilayah Palestina seperti Gaza dan Ramallah. Dengan pendekatan historis, Hamli menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara Israel yang memiliki keunggulan militer dan dukungan internasional, dengan Palestina yang berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan ruang gerak.

Sementara itu, Farhan Nur Hadiat (2011) meninjau konflik ini melalui perspektif hukum humaniter internasional. Ia menyoroti insiden kunjungan Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al-Aqsa sebagai pemicu eskalasi kekerasan baru, serta kegagalan Perjanjian Oslo 1993 yang sebelumnya diharapkan menjadi pintu menuju kemerdekaan Palestina. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dinilai semakin memperburuk ketegangan dan memperdalam ketidakpercayaan di antara kedua belah pihak.

Berdasarkan keseluruhan kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai konflik Israel–Palestina masih didominasi oleh pendekatan sejarah, politik, agama, diplomasi, dan hukum internasional. Namun, kajian yang secara khusus menelaah faktor budaya strategis dalam membentuk pola pengambilan keputusan Israel, terutama dalam konteks agresi militer dan intensi pendudukan

wilayah Palestina, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan teori *Strategic Culture Johnston* (1995) serta konsep Budaya Strategis untuk menganalisis bagaimana budaya strategis memengaruhi intensi pendudukan Israel terhadap Palestina pada periode 2021–2024. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus memperkaya studi hubungan internasional dalam memahami dinamika kebijakan luar negeri Israel secara lebih komprehensif dan kontekstual.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Strategic culture

Teori *strategic culture* atau budaya strategis pertama kali diperkenalkan oleh Jack Snyder pada tahun 1977 dalam laporan penelitian berjudul *The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations* yang disusun untuk RAND Corporation. Snyder (1977) mendefinisikan budaya strategis sebagai kerangka berpikir dan nilai-nilai yang membentuk persepsi suatu negara mengenai ancaman, kekuatan, dan penggunaan kekerasan dalam konteks keamanan nasional. Ia berpendapat bahwa strategi militer suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kepentingan material atau logika rasional, tetapi juga oleh pola nilai, pengalaman historis, dan tradisi sosial yang diwariskan secara kolektif.

Dengan demikian, budaya strategis berfungsi sebagai lensa interpretatif yang memandu para pengambil keputusan dalam merespons ancaman dan menentukan strategi pertahanan. Snyder menegaskan bahwa setiap negara memiliki orientasi strategis yang unik, dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan budaya militernya. Faktor-faktor tersebut menciptakan pola perilaku yang relatif stabil dan cenderung berulang dalam menentukan arah kebijakan luar negeri serta keputusan militer (Snyder, 1977).

Menurut Al-Rodhan (2015), budaya strategis juga melibatkan integrasi antara memori sejarah, identitas nasional, dan dimensi emosional seperti trauma kolektif, serta persepsi moralitas yang melekat pada tindakan negara. Oleh karena itu, perilaku politik luar negeri sering kali merupakan ekspresi dari nilai-nilai simbolik dan keyakinan kolektif, bukan semata hasil kalkulasi rasional. Dalam konteks ini, konflik atau tindakan militer dapat dipahami sebagai manifestasi dari cara suatu bangsa memaknai eksistensinya di dunia.

Pemikiran Snyder tersebut kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh Alastair Iain Johnston dalam karyanya *Thinking About Strategic Culture* (1995). Johnston mengoperasionalkan teori budaya strategis agar dapat diuji secara empiris. Ia mendefinisikan budaya strategis sebagai “*a system of symbols and assumptions about the role of war in human affairs, the efficacy of the use of force, and the conditions under which it is legitimate to use it*” (Johnston, 1995). Dalam pandangan Johnston, budaya strategis berfungsi sebagai sistem keyakinan (*belief system*) yang diwariskan secara historis dan membentuk persepsi aktor strategis

terhadap ancaman, kekuatan, serta perilaku yang dianggap sah dalam konteks pertahanan dan keamanan.

Johnston (1995) membagi budaya strategis menjadi tiga komponen utama:

1. Asumsi tentang konflik dan lingkungan strategis, yaitu persepsi mengenai sifat dasar ancaman dan legitimasi penggunaan kekuatan dalam menghadapi lawan.
2. Pandangan terhadap peran kekuatan dan strategi militer, yakni cara suatu negara memahami efektivitas dan tujuan penggunaan kekuatan bersenjata.
3. Preferensi perilaku strategis (*behavioral preferences*), yaitu kecenderungan konsisten dalam memilih cara merespons krisis keamanan, termasuk kapan dan bagaimana kekuatan digunakan.

Pendekatan Johnston menekankan pentingnya analisis kognitif terhadap cara berpikir elite politik dalam memahami dan merespons ancaman. Budaya strategis di sini berfungsi seperti peta kognitif yang mengarahkan interpretasi para pembuat kebijakan terhadap situasi strategis. Dengan demikian, budaya strategis tidak hanya menjelaskan “apa” yang dilakukan negara, tetapi juga “mengapa” pilihan tersebut dianggap paling tepat secara moral dan historis (Johnston, 1995).

Dari sudut pandang Snyder, pola ini mencerminkan internalisasi nilai-nilai historis dan ideologis yang mendasari keputusan politik dan militer Israel. Narasi seperti “Eretz Yisrael” (Tanah Israel) dan konsep “Tanah yang Dijanjikan” (*The Promised Land*) bukan hanya mitos religius, tetapi juga simbol ideologis yang memperkuat legitimasi moral terhadap pendudukan (Peleg, 2021). Budaya strategis Israel menggabungkan unsur sejarah, agama, dan identitas kolektif dalam satu

kerangka yang menjustifikasi tindakan militer sebagai kewajiban eksistensial. Sementara itu, melalui kerangka Johnston, budaya strategis Israel dapat dipahami sebagai struktur kognitif yang membentuk persepsi elite terhadap ancaman dan strategi. Analisis terhadap pidato-pidato Benjamin Netanyahu antara tahun 2022 hingga 2024 memperlihatkan konsistensi narasi eksistensial dalam setiap kebijakan militer Israel.

Dalam kajian hubungan internasional, semakin diakui bahwa perilaku negara tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan rasional dan kepentingan material semata. Faktor non-material seperti memori historis, trauma kolektif, dan konstruksi identitas nasional terbukti memainkan peran penting dalam membentuk orientasi kebijakan suatu negara. (Khairunisa et al., 2022) menunjukkan bahwa pengalaman traumatis di masa lalu dapat terinternalisasi dalam ingatan kolektif suatu bangsa dan kemudian membentuk arah kebijakan politiknya di masa kini. Studi tersebut menegaskan bahwa memori kolektif berfungsi sebagai dasar kognitif dan emosional dalam membangun persepsi ancaman dan legitimasi tindakan negara. Dalam konteks Israel, hal ini relevan untuk memahami bagaimana pengalaman sejarah, konflik regional, dan narasi ancaman eksistensial membentuk budaya strategis yang kemudian melegitimasi intensi mempertahankan pendudukan wilayah Palestina.

Dalam konteks penelitian ini, teori budaya strategis memberikan fondasi konseptual untuk memahami mengapa Israel tetap konsisten melanjutkan pendudukan terhadap wilayah Palestina meskipun mendapat tekanan internasional. Faktor budaya strategis memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara sejarah, ideologi, dan perilaku kebijakan luar negeri. Dengan menggabungkan

pendekatan Snyder yang menyoroti nilai historis dan simbolik, serta pendekatan Johnston yang menekankan dimensi kognitif dan empiris, penelitian ini menempatkan budaya strategis sebagai determinan utama dalam pembentukan intensi pendudukan Israel terhadap Palestina periode 2022–2024.

1.7 Operasinalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Intensi Pendudukan

Menurut Fishbein dan Ajzen (Riyanti, 2007), intensi merupakan posisi seseorang dalam dimensi probabilitas subjektif yang melibatkan hubungan antara individu dengan tindakan tertentu. Intensi menggambarkan faktor motivasional yang memengaruhi perilaku dan menunjukkan seberapa besar kemauan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, intensi adalah kecenderungan atau niat yang mengarahkan perilaku nyata ketika terdapat kesempatan yang memungkinkan.

Dalam konteks hubungan internasional, konsep intensi dapat diperluas untuk memahami niat atau kehendak suatu negara dalam bertindak terhadap aktor lain, baik dalam bentuk kebijakan diplomatik, ekonomi, maupun militer. Intensi negara biasanya terbentuk melalui kombinasi faktor internal seperti ideologi, persepsi ancaman, dan nilai budaya strategis yang tertanam dalam kebijakan luar negeri.

Adapun “pendudukan” secara terminologis diartikan sebagai tindakan suatu kekuatan untuk merebut, menempati, dan menguasai wilayah yang secara sah berada

di bawah kedaulatan pihak lain. Menurut hukum humaniter internasional, pendudukan terjadi ketika suatu wilayah berada di bawah kekuasaan efektif pasukan militer asing tanpa adanya kedaulatan sah atas wilayah tersebut (Geneva Convention IV, 1949). Dalam praktiknya, pihak yang melakukan pendudukan dapat membentuk pemerintahan militer atau sistem administrasi sementara untuk mengatur wilayah yang dikuasainya.

Dengan demikian, intensi pendudukan dalam penelitian ini dimaknai sebagai niat dan motivasi strategis suatu negara untuk mempertahankan atau memperluas kontrol atas wilayah tertentu melalui tindakan militer, politik, maupun administratif. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana Israel secara konsisten menunjukkan kecenderungan mempertahankan pendudukan di wilayah Palestina sebagai bagian dari strategi keamanan dan identitas nasionalnya.

1.7.1.2 Budaya Strategis

Secara konseptual, budaya strategis (*strategic culture*) adalah seperangkat nilai, keyakinan, asumsi, dan pola berpikir yang diwariskan secara historis dan memengaruhi bagaimana suatu negara memandang, menafsirkan, dan merespons ancaman terhadap keamanan nasionalnya (Johnston, 1995; Snyder, 1977). Budaya strategis membentuk kerangka kognitif dan normatif yang digunakan oleh para pengambil keputusan untuk menentukan strategi militer, kebijakan luar negeri, dan tindakan pertahanan.

Jack Snyder (1977) pertama kali mendefinisikan *strategic culture* sebagai “seperangkat keyakinan dan asumsi yang mapan tentang penggunaan kekuatan dan

kekerasan yang tertanam dalam komunitas strategis suatu negara.” Alastair Iain Johnston (1995) kemudian memperluasnya dengan menyebut bahwa budaya strategis merupakan “sistem simbolik historis yang menghasilkan preferensi perilaku strategis tertentu terhadap penggunaan kekuatan militer dan respon terhadap konflik.”

Dengan demikian, budaya strategis tidak hanya menjelaskan perilaku militer suatu negara, tetapi juga berfungsi sebagai “lensa budaya” yang membatasi pilihan kebijakan dan membentuk persepsi tentang ancaman, keamanan, serta legitimasi penggunaan kekuatan. Budaya dapat dipahami sebagai hasil konstruksi manusia yang meliputi sistem nilai, kepercayaan, bahasa, tradisi, serta ekspresi seni yang membentuk cara pandang kolektif terhadap dunia. Sepanjang sejarah, elemen-elemen budaya ini berperan dalam membangun identitas peradaban dan membedakan satu masyarakat dari yang lain.

Dalam konteks perebutan wilayah, identitas budaya berpengaruh besar terhadap pola interaksi antarnegara. Hubungan antara budaya, identitas, dan penyebab konflik teritorial menunjukkan bahwa budaya bersifat dinamis. Hal tersebut menjadi kekuatan yang mendorong perilaku politik, termasuk motivasi suatu negara untuk menguasai wilayah tertentu. Budaya juga berfungsi sebagai kerangka yang membentuk cara suatu negara memahami posisinya dalam sistem internasional, sekaligus menuntun kepentingan, nilai, serta ambisinya. Dengan demikian, identitas budaya turut menentukan bagaimana suatu negara menafsirkan relasinya dengan pihak lain (Hudson & Sampson, 1999).

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Intensi Pendudukan

Secara konseptual, intensi pendudukan mengacu pada motivasi, tujuan, dan orientasi strategis yang mendasari tindakan suatu negara dalam mempertahankan atau memperluas kontrol atas wilayah yang bukan merupakan bagian sah dari kedaulatannya. Intensi ini tidak selalu diwujudkan secara eksplisit dalam kebijakan formal, melainkan tercermin melalui pola tindakan politik, militer, dan wacana publik yang konsisten mendukung keberlanjutan pendudukan (Hensel, 2019).

Dalam konteks konflik Israel–Palestina, intensi pendudukan merefleksikan keyakinan dan preferensi strategis Israel untuk mempertahankan dominasi teritorial atas wilayah Palestina baik melalui pembangunan permukiman, kebijakan aneksasi *de facto*, maupun operasi militer. Intensi tersebut muncul dari kombinasi antara faktor ideologis (Zionisme dan narasi “tanah leluhur”), faktor keamanan (ancaman eksistensial), serta faktor politik domestik (tekanan koalisi dan ideologi partai).

Berdasarkan landasan tersebut, intensi pendudukan dioperasionalkan melalui tiga indikator utama yang dapat diamati secara empiris dalam kebijakan dan praktik politik Israel terhadap Palestina periode 2022–2024, yaitu:

Tabel 1.1 Indikator Operasional Teori *Strategic Culture* (Johnston 1995)

Indikator Operasional	
Ideologi dan Historis	Legitimasi religius-historis atas wilayah Palestina sebagai bagian dari “Eretz Yisrael”; retorika politik yang menekankan identitas nasional dan klaim atas tanah leluhur dalam pidato elite pemerintahan.
Keamanan dan Militer	Penggunaan narasi ancaman eksistensial untuk membenarkan operasi militer, blokade, dan kontrol perbatasan. Justifikasi keamanan sebagai dasar perluasan permukiman dan aneksasi wilayah.
Politik	Konsistensi kebijakan pemerintah dalam memperluas permukiman dan melemahkan kedaulatan Palestina. Dukungan institusional dan legislasi domestik yang mempertahankan status quo pendudukan.

Sumber; Johnston, Alastair lain. (1995). “*Thinking About Strategic Culture.*”

Dari ketiga dimensi tersebut, intensi pendudukan dapat dipahami sebagai bentuk konsistensi perilaku strategis yang menegaskan keberlanjutan kontrol Israel atas wilayah Palestina. Ia bukan sekadar kebijakan sementara, tetapi merupakan manifestasi dari orientasi jangka panjang yang tertanam dalam kerangka berpikir politik dan budaya strategis Israel. Dengan demikian, konsep ini berfungsi sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian, yang dianalisis melalui ekspresi kebijakan, pidato elite politik (terutama Benjamin Netanyahu), serta langkah-langkah militer dan administratif yang diambil sepanjang periode 2022–2024.

Melalui definisi operasional ini, intensi pendudukan dapat diidentifikasi dari keselarasan antara nilai-nilai ideologis, retorika keamanan, dan praktik kebijakan konkret yang menunjukkan komitmen Israel untuk mempertahankan dominasi di wilayah Palestina, meskipun menghadapi tekanan internasional dan risiko diplomatik.

Dengan pendekatan ini, intensi pendudukan tidak hanya dipahami sebagai ambisi politik atau strategi militer, tetapi juga sebagai refleksi dari sistem keyakinan yang mengakar dalam budaya strategis Israel di mana keamanan, identitas, dan kedaulatan teritorial menjadi simbol utama keberlangsungan negara.

1.7.2.2 Budaya Strategis

Dalam penelitian ini, budaya strategis dioperasionalkan sebagai kerangka nilai, asumsi, dan keyakinan yang membentuk cara berpikir serta perilaku strategis Israel terhadap Palestina. Operasionalisasi ini mengacu pada model tiga komponen utama yang dikembangkan oleh Alastair Iain Johnston (1995):

Tabel 1.2 Indikator Kognitif Teori *Strategic Culture* (Johnston 1995)

Komponen Budaya Strategis (Johnston, 1995)	Indikator Operasional dalam Kasus Israel-Palestina
1. Asumsi tentang konflik dan lingkungan strategis	Persepsi Israel terhadap Palestina sebagai ancaman eksistensial. Narasi bahwa keamanan nasional Israel hanya dapat dijaga melalui kontrol teritorial (<i>security through dominance</i>).

2. Pandangan tentang peran kekuatan militer dan strategi keamanan	Penekanan pada militerisasi kebijakan luar negeri. Legitimasi terhadap penggunaan kekuatan (operasi militer, blokade, serangan udara) sebagai instrumen utama pertahanan.
3. Preferensi perilaku strategis (behavioral preferences)	Pola tindakan berulang seperti pembangunan permukiman ilegal, kebijakan aneksasi de facto, dan tindakan pencegahan (<i>preemptive strikes</i>) terhadap kelompok Palestina.

Sumber: Johnston, Alastair lain. (1995). “*Thinking About Strategic Culture.*”

Tabel di atas menunjukkan bahwa budaya strategis Israel menjadi fondasi utama dalam pembentukan perilaku strategisnya terhadap Palestina. Asumsi-asumsi dan nilai yang terbentuk secara historis menghasilkan pola pikir *security through dominance*. Suatu pandangan bahwa keamanan hanya dapat dijamin melalui penguasaan wilayah dan kontrol terhadap lingkungan strategis.

Dengan demikian, *strategic culture* berfungsi sebagai variabel penjelas (explanatory variable) yang menghubungkan antara ideologi (seperti Zionisme dan identitas nasional Yahudi) dengan perilaku politik luar negeri Israel di wilayah pendudukan.

Definisi operasional ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan nilai-nilai ideologis dengan tindakan kebijakan konkret melalui analisis kognitif terhadap pernyataan, pidato, serta keputusan strategis pemerintahan Israel khususnya di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu pada periode 2022–2024. Analisis diarahkan

untuk menelusuri bagaimana asumsi historis, mitos nasional, dan konstruksi identitas Zionis membentuk preferensi strategis Israel yang bersifat ekspansionis sekaligus defensif.

Dengan pendekatan ini, budaya strategis tidak hanya dipahami sebagai konteks historis, tetapi juga sebagai pola pikir aktif (*active cognitive framework*) yang secara konsisten mendorong Israel dalam merumuskan dan menjustifikasi kebijakan pendudukan terhadap Palestina.

1.8 Argumen Penelitian

Berdasarkan perspektif *strategic culture*, penelitian ini berargumen bahwa konflik antara Israel dan Palestina tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh faktor sejarah, melainkan lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan pola perilaku strategis yang telah mengakar dalam identitas nasional Israel. Faktor-faktor tersebut membentuk cara pandang dan persepsi ancaman yang kemudian terinternalisasi dalam kebijakan luar negeri dan strategi keamanan Israel.

Dengan demikian, tindakan agresi dan pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina dapat dipahami sebagai manifestasi dari budaya strategis yang menekankan pada kebutuhan mempertahankan keamanan eksistensial dan teritorial. Pemahaman ini menunjukkan bahwa melihat konflik hanya dari sudut pandang historis tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas dinamika politik dan keamanan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan perspektif analisis

menjadi krusial untuk merumuskan pendekatan resolusi konflik yang lebih realistis dan berkelanjutan.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif, yang bertujuan menjelaskan hubungan antara budaya strategis Israel dan intensi pendudukan terhadap wilayah Palestina. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan terhadap narasi, retorika, dan justifikasi kebijakan keamanan yang tidak dapat dianalisis secara kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), dengan sumber data berupa pernyataan resmi dan pidato elite politik Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta pemberitaan media internasional dan media Israel pada periode 2022–2024. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola narasi dan asumsi kognitif yang mencerminkan budaya strategis Israel. Melalui kerangka budaya strategis Johnston (1995), hasil analisis isi digunakan untuk menelusuri bagaimana asumsi dasar tentang konflik, persepsi ancaman, orientasi terhadap penggunaan kekuatan, dan pola perilaku strategis terefleksikan dalam wacana publik dan kebijakan keamanan Israel.

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika dan makna di balik

fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan melalui studi dokumentasi (library research) dan analisis dokumen, dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang kredibel. Data penelitian diperoleh dari beragam literatur, meliputi artikel ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta publikasi media internasional yang relevan dengan konteks konflik Israel–Palestina. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelusuri bagaimana nilai-nilai budaya dan keyakinan strategis berperan dalam membentuk pola perilaku dan intensi pendudukan Israel di wilayah Palestina. Analisis dilakukan dengan mengkaji secara sistematis pola-pola naratif, kecenderungan kebijakan, serta implikasi strategis dari berbagai sumber data tersebut. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana faktor budaya strategis terinternalisasi dalam kebijakan luar negeri dan praktik pendudukan Israel.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan sumber data yang diperoleh melalui berbagai dokumen dan literatur resmi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data dikumpulkan dari beragam publikasi akademik seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional, serta situs web resmi yang kredibel. Penelitian ini berfokus pada penggunaan data sekunder, mengingat keterbatasan akses langsung ke wilayah konflik. Meskipun demikian, penggunaan sumber sekunder tidak mengurangi kedalaman maupun cakupan analisis penelitian ini. Sebaliknya, keberagaman publikasi ilmiah

mengenai isu Palestina–Israel dan dinamika kawasan Timur Tengah justru memungkinkan peneliti untuk menyusun kajian yang komprehensif. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur akademik, laporan riset kebijakan, serta publikasi dari lembaga riset dan organisasi internasional yang relevan dengan topik penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah negara Israel sebagai aktor utama yang menjadi fokus analisis. Sementara itu, objek penelitian berkaitan dengan pengaruh faktor sosial dan budaya yang berperan dalam membentuk pola perilaku negara tersebut terhadap situasi ancaman dan kebijakan pendudukannya di wilayah Palestina. Dengan memahami faktor-faktor sosial-budaya ini, penelitian berupaya menelaah bagaimana identitas, nilai, dan keyakinan kolektif memengaruhi tindakan politik Israel dalam konteks konflik yang berlangsung.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Data tersebut meliputi sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian terdahulu, dokumen organisasi internasional, serta artikel dan berita resmi yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan interpretasi makna dari teks dan konteks (Creswell, 2014). Seluruh data kemudian dianalisis

secara deskriptif dan eksplanatif untuk mengungkap hubungan antara faktor sosial-budaya dan perilaku politik Israel.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh lembaga resmi, organisasi riset, maupun peneliti independen. Sumber-sumber tersebut mencakup laporan dari lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, badan internasional, serta berbagai publikasi ilmiah dan jurnal akademik. Penggunaan data sekunder relevan karena dapat memberikan landasan empiris yang kuat untuk menganalisis dinamika konflik secara komprehensif.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen (documentary research) dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan sebagai unit teks untuk dianalisis. Sumber data meliputi pernyataan dan laporan resmi pemerintah Israel, publikasi organisasi non-pemerintah, serta pemberitaan media internasional dan media Israel yang berkaitan dengan kebijakan keamanan dan pendudukan di wilayah Palestina pada periode 2022–2024. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh tinjauan pustaka terhadap buku dan artikel akademik yang relevan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memberikan konteks analitis terhadap data utama. Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan

pendekatan analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi pola narasi, asumsi kognitif, dan justifikasi kebijakan yang mencerminkan budaya strategis Israel.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menerapkan analisis data berbasis dokumen yang relevan dengan konteks pendudukan Israel di wilayah Gaza dan Tepi Barat. Sumber yang digunakan meliputi laporan organisasi internasional, publikasi akademik, pemberitaan media kredibel, serta dokumen kebijakan resmi. Setiap dokumen dikaji untuk menelusuri sejauh mana faktor sosial dan budaya berperan dalam membentuk pola tindakan dan kebijakan pendudukan. Tahap interpretasi data dilakukan dengan menyusun temuan-temuan tersebut ke dalam kerangka analisis eksplanatif, guna memahami hubungan antara faktor budaya strategis dan perilaku agresif negara. Setelah data dikategorikan berdasarkan tema dan keterkaitannya, peneliti melakukan analisis untuk melihat pola hubungan antara dinamika kebijakan Israel dan fenomena serupa di konteks lain. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap faktor-faktor pendorong dalam konflik Israel–Palestina.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui penggunaan sumber-sumber sekunder yang memiliki kredibilitas tinggi dan dapat diverifikasi. Data diperoleh dari literatur ilmiah, laporan riset terdahulu, buku akademik, serta publikasi lembaga resmi dan

media internasional yang diakui. Seluruh data yang dikumpulkan digunakan untuk memperkuat validitas temuan serta mendukung analisis terhadap pengaruh faktor sosial dan budaya dalam membentuk perilaku serta intensi pendudukan Israel di wilayah Palestina. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki dasar empiris dan teoritis yang kuat.